



Implementasi Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani

Candra Ayu* & Hayati

Program Doktor Pertanian Berkelanjutan, Universitas Mataram, Jl. Majapahit 62, Mataram, Indonesia 83125.

Email Korespondensi: ayucandra22@unram.ac.id

Abstrak

Pembangunan merupakan proses transformasi ekonomi, sosial, dan budaya yang menempatkan pengembangan masyarakat sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Pengembangan masyarakat menekankan partisipasi aktif dan pemberdayaan komunitas agar mandiri, bebas eksploitasi, dan mampu mengatasi kesenjangan sosial secara berkelanjutan. Di Indonesia, pemberdayaan petani sangat penting karena keterbatasan akses teknologi, modal, dan informasi yang menyebabkan produktivitas rendah dan kemiskinan tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur, bertujuan menganalisis implementasi prinsip-prinsip pengembangan masyarakat dalam program pemberdayaan petani tanaman pangan periode 2016-2024. Sumberdata data dari artikel ilmiah dengan basis data Google scholar, jurnal terakreditasi Ristekdikti dan data sekunder lain yang relevan. Analisis data berdasarkan derajat implementasi 26 prinsip pengembangan masyarakat Jim Ife dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 65% prinsip pengembangan masyarakat telah diimplementasikan dengan baik, terutama pada prinsip partisipasi, pemberdayaan, dan definisi kebutuhan. Namun, kelemahan signifikan pada prinsip penghargaan terhadap sumber daya lokal dan struktur yang merugikan petani masih sangat rendah diimplementasikan. Perlu aktivitas pemberdayaan khusus agar pembangunan masyarakat bersifat inklusif, adil, dan berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan komunitas, reformasi kebijakan agar pro-petani, serta penguatan kelembagaan dan jejaring antar petani.

Kata kunci: Prinsip Pengembangan Masyarakat; Pemberdayaan; Masyarakat Petani.

Implementation of Community Development Principles in Empowering Farming Communities

Abstract

Development is a process of economic, social, and cultural transformation that places community development as the key to improving the quality of life in a sustainable manner. Community development emphasizes active participation and empowerment of communities to be independent, free from exploitation, and able to overcome social disparities in a sustainable manner. In Indonesia, farmer empowerment is very important because of limited access to technology, capital, and information that causes low productivity and high poverty. This study is a qualitative study with a literature study approach, aiming to analyze the implementation of community development principles in the food crop farmer empowerment program for the 2016-2024 period. Data sources from scientific articles with Google scholar databases, Ristekdikti accredited journals and other relevant secondary data. Data analysis is based on the degree of implementation of Jim Ife's 26 community development principles in farmer community empowerment activities. The results of the study show that 65% of community development principles have been implemented well, especially in the principles of participation, empowerment, and definition of needs. However, significant weaknesses in the principle of respect for local resources and structures that are detrimental to farmers are still very low in implementation. Special empowerment activities are needed so that community development is inclusive, equitable, and sustainable through community education and training, pro-farmer policy reform, and strengthening institutions and networks between farmers.

Keywords: Community Development Principles; Empowerment; Farmer Community.

How to Cite: Ayu, C., & Hayati, H. (2025). Implementasi Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani. *Empiricism Journal*, 6(2), 412–417. <https://doi.org/10.36312/ej.v6i2.3016>



<https://doi.org/10.36312/ej.v6i2.3016>

Copyright© 2025, Ayu & Hayati

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju tujuan tertentu (Portes et al, 1993). Hubungan pembangunan dan pengembangan masyarakat sangat erat dan saling melengkapi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan masyarakat

mencakup proses perubahan yang melibatkan aspek ekonomi, teknologi, dan sosial, dengan tujuan menciptakan masyarakat mandiri dan bebas dari eksplorasi; sedangkan pengembangan masyarakat menekankan partisipasi aktif masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan melalui pendekatan berbasis komunitas, memperkuat solidaritas, dan mengatasi kesenjangan sosial secara berkelanjutan (Hasim dkk, 2009; Suharto, 2014). Dengan demikian, pengembangan masyarakat menjadi strategi penting dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, yang menjadikan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan (Midgley, 2025).

Pengembangan masyarakat didasari sebuah cita-cita bahwa masyarakat bisa dan harus mengambil tanggung jawab dalam merumuskan kebutuhan, mengusahakan kesejahteraan, menangani sumberdaya dan mewujudkan tujuan hidup mereka sendiri. Pengembangan masyarakat diarahkan untuk membangun struktur masyarakat yang kehidupannya didasarkan pada pengembangan dan pembagian sumberdaya secara adil, adanya interaksi sosial, partisipasi dan upaya saling mendorong/menguatkan serta saling menghargai. Pengembangan masyarakat bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mandiri dan mampu mengelola sumber daya secara swadaya (Zubaedi, 2016; Ife et al, 2024).

Dalam sejarahnya, pemberdayaan menjadi gerakan perlawanan pembangunan alternatif terhadap hegemoni developmentalisme teori modernisasi pada model pembangunan ekonomi yang pro pertumbuhan, yang justeru menimbulkan kemiskinan tinggi di negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia. Hal ini terjadi karena program pembangunan pro pertumbuhan dibangun dengan pendekatan top-down seringkali tidak sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat yang menjadi tujuan pembangunan tersebut. Akibatnya, segmen masyarakat yang miskin akan tetap miskin dan bahkan bertambah miskin sedangkan masyarakat yang kaya bertambah kaya (Munaji, 2019; Digidowiseiso, 2019).

Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu tema sentral dalam pembangunan masyarakat seharusnya diletakkan dan diorientasikan searah dengan paradigma baru pendekatan pembangunan. Paradigma pembangunan lama yang bersifat top-down perlu di re-orientasikan menuju pendekatan bottom-up yang menempatkan masyarakat atau petani di pedesaan sebagai pusat pembangunan atau oleh Chambers dalam Suaib (2023) dikenal dengan semboyan “put the farmers first”. Semboyan ini menekankan pentingnya menempatkan petani sebagai pusat perhatian dalam setiap program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pertanian. Pendekatan ini mengedepankan partisipasi aktif petani sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan pertanian. Dengan demikian, semboyan “put the farmers first” mengajak para pembuat kebijakan, pengembang program, dan semua pemangku kepentingan untuk mengutamakan perspektif dan kebutuhan petani agar pembangunan pertanian dapat berjalan efektif dan berkelanjutan

Konsep pemberdayaan masyarakat menurut Zubaedi (2016) berasal dari pandangan yang menempatkan manusia sebagai subyek dari dunianya sendiri. Pola dasar pergerakan pemberdayaan ini mengamanatkan kepada perlunya “power” dan menekankan keberpihakan kepada kelompok yang tidak berdaya. Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap rakyatnya. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu agenda penting dalam pengembangan ekonomi dan sosial di Indonesia, terutama di kalangan petani. Konsep ini diusulkan oleh Jim Ife dalam bukunya "Community Development: A Critical Approach" yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian petani dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial (Ife et al, 2024).

Di Indonesia, strategi pemberdayaan petani telah diterapkan melalui berbagai program, namun keberhasilannya sering kali dipengaruhi oleh seberapa baik prinsip-prinsip pengembangan masyarakat diterapkan. Prinsip-prinsip pengembangan masyarakat yang diusulkan oleh Jim Ife berorientasi pada partisipasi aktif segenap anggota masyarakat dalam kegiatan pembangunan serta menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Pendekatan ini mengacu pada konsep "community-based development" atau pembangunan berbasis masyarakat, yang mendorong partisipasi aktif warga dalam setiap

tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan (Nain, 2023). Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan akan meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab sosial mereka, yang memungkinkan terjadinya keberlanjutan ekonomi dan kelestarian budaya lokal.

Pemberdayaan masyarakat petani sangat diperlukan karena mereka sering berada dalam posisi marginal dengan keterbatasan akses teknologi, modal, dan informasi, sehingga produktivitas rendah dan kemiskinan tinggi. Petani sering memiliki posisi tawar yang lemah dalam struktur politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini menyebabkan kemiskinan dan ketidakberdayaan mereka dalam mengelola usaha tani secara optimal (Iryana, 2018). Selain itu, sebagian besar petani masih menggunakan metode tradisional yang kurang efisien dan memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi, informasi, modal, serta infrastruktur yang memadai. Karena masyarakat petani sering kali berada dalam posisi yang rentan, menghadapi masalah seperti akses terhadap sumber daya, informasi, dan pasar. Menurut Mardikanto dan Subianto (2019), pemberdayaan mencakup pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat, pengembangan usaha produktif, dan penyediaan informasi yang tepat guna.

Pemberdayaan bertujuan menciptakan masyarakat yang mandiri, berdaya saing, dan mampu mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang mereka hadapi. Dengan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan akses petani terhadap sumber daya dan teknologi, produktivitas pertanian dapat ditingkatkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga memperbaiki kondisi ekonomi desa secara keseluruhan. Selain itu, pemberdayaan petani dapat meningkatkan ketahanan pangan lokal, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip pengembangan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat petani di pedesaan Indonesia. Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk implementasi prinsip-prinsip pengembangan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat petani di pedesaan Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan/Studi Literatur (Sugiyono, 2021). Studi literatur dilakukan dengan menganalisis data sekunder dalam bentuk artikel ilmiah dengan basis data Google scholar, Semantic Scholar dan jurnal terakreditasi Ristekdikti (jurnal Sinta), buku-buku referensi, jumlah naskah yang dikaji sebanyak 12 naskah dengan topik "Implementasi Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat" dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Petani Tanaman Pangan di Indonesia selama periode tahun 2016 - 2024. Sebagai dasar analisis data adalah 26 prinsip-prinsip pengembangan masyarakat untuk aktivitas pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Jim Ife (Ife dan Tesoriero, 2024). Adapun Langkah-langkah penelitian yang dilakukan, sebagai berikut: 1). Pengumpulan data; 2). Melakukan evaluasi dan seleksi literatur berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kualitasnya. Hanya sumber yang memenuhi standar akademis tinggi yang akan digunakan. Proses ini melibatkan penilaian terhadap metodologi penelitian, validitas data, dan kesesuaian dengan konteks penelitian. 3). Penentuan derajat implementasi prinsip-prinsip pengembangan masyarakat, dan pembahasan untuk disimpulkan secara general.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Empiris Pemberdayaan Masyarakat Petani

Pemberdayaan petani perlu dilakukan karena memiliki peran strategis dalam meningkatkan produktivitas pertanian, pendapatan, dan kesejahteraan petani serta masyarakat pedesaan secara keseluruhan. Berikut ini adalah hasil-hasil evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat petani tanaman pangan di Indonesia:

1. Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan. Pemberdayaan petani melalui pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan membantu petani menguasai teknik pertanian modern dan efisien, sehingga produktivitas pertanian meningkat signifikan (Rustandi dan Ismulhadi, 2019; Wahyuni, 2021).

2. Meningkatkan Produktivitas dan Pendapatan. Dengan penerapan teknologi dan teknik yang tepat, hasil panen meningkat, yang secara langsung meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan mereka (Wahyuni, 2021).
3. Mengurangi Kerentanan Petani. Pemberdayaan juga membantu petani mengurangi risiko dari perubahan iklim, bencana alam, dan fluktuasi harga dengan strategi adaptasi dan pengelolaan risiko yang lebih baik (Famuji, 2022; Unila, 2023).
4. Meningkatkan Akses ke Modal dan Pasar. Melalui kelembagaan petani dan jejaring kemitraan, petani memperoleh akses lebih mudah ke permodalan dan pasar, yang mendukung pengembangan usaha agribisnis perdesaan (Wahyuni, 2021).
5. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi. Pemberdayaan berdampak pada peningkatan kualitas hidup petani, termasuk akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, sehingga memperkuat ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi desa (Papayan, 2023).

Kajian Empiris Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat

Jim Ife menegaskan bahwa 26 prinsip pengembangan masyarakat ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan harus dipahami sebagai satu kesatuan yang holistik. Prinsip-prinsip ini menekankan keseimbangan antara aspek ekologis, keadilan sosial, penghargaan terhadap lokal, proses yang inklusif dan damai, serta integrasi antara konteks global dan lokal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pengembangan masyarakat dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberdayakan seluruh anggota komunitas secara adil. Berikut penjelasan terstruktur dan berkualitas mengenai 26 prinsip pengembangan masyarakat menurut Jim Ife (2024):

Prinsip Ekologis, prinsip ini menekankan hubungan antara manusia dengan lingkungan secara holistik dan berkelanjutan, meliputi:

1. **Holisme**: Prinsip holism menekankan pada pentingnya melihat segala sesuatu secara menyeluruh dan saling terkait dalam konteks pengembangan masyarakat.
2. **Berkelanjutan, merupakan prinsip yang sangat penting**, proses pengembangan harus berkelanjutan dan bertahan dalam jangka panjang. Berkelanjutan mensyaratkan bahwa penggunaan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui diminimalkan, pengurangan polutan, mendaur ulang
3. **Keanekaragaman**: Menghargai keanekaragaman dapat mengatasi ancaman ekologis pada sistem monokultur, globalisasi budaya, dan wacana menghapus rasisme, seksisme, dan ageism (diskriminasi karena umur).
4. **Perkembangan organik**: Perkembangan masyarakat harus alami dan tumbuh secara bertahap, bukan dipaksakan dan tidak mekanistik.
5. **Perkembangan yang seimbang (*balance and equilibrium*)**, yakni pengembangan masyarakat terpadu dan seimbang dengan menggunakan enam dimensi (sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan dan pengembangan personal/spiritual).

Prinsip Keadilan Sosial dan Hak Asasi Manusia: prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan serta HAM dalam pengembangan masyarakat:

1. Mengatasi struktur yang merugikan, misalnya penindasan golongan, gender, ras, etnis dan bentuk pendasan struktur lainnya agar terwujud keadilan sosial dan HAM.
2. Mengatasi wacana-wacana yang merugikan, misalnya wacana kekuasaan dan penindasan secara efektif memberdayakan sebagian masyarakat sedang sebagian lainnya dimarginalkan/dilemahkan.
3. Pemberdayaan. Pemberdayaan seharusnya menjadi tujuan dari segala bentuk pengembangan masyarakat. Strategi pemberdayaan yang sempurna mensyaratkan bahwa rintangan bagi orang-orang yang menjalankan kekuasaan dapat dipahami, diarahkan dan diatasi. Artinya, pemberdayaan adalah perubahan radikal yang menjatuhkan struktur-struktur dan wacana dominasi yang ada.
4. Hak Asasi Manusia. Menjamin hak-hak semua anggota masyarakat tanpa kecuali.
5. Definisi Kebutuhan. Prinsip ini menekankan pentingnya mendeskripsikan dan memahami kebutuhan masyarakat secara bersama-sama dalam proses pengembangan masyarakat. Ada dua hal utama dalam prinsip ini: a. pembangunan masyarakat harus didasarkan pada kesepakatan berbagai elemen, yaitu penduduk secara keseluruhan, konsumen, penyedia layanan, dan peneliti. Ini memastikan bahwa kebutuhan yang diidentifikasi

benar-benar representatif dan relevan dengan masyarakat yang bersangkutan, b). Definisi kebutuhan harus memperhatikan preseden yang ditimbulkan serta aspek keadilan sosial dan ekologis, sehingga pengembangan dilakukan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga berkelanjutan dan adil bagi semua pihak.

Prinsip Menghargai yang Lokal, pengembangan masyarakat harus menghormati dan melibatkan kearifan lokal dan budaya setempat:

1. Menghargai pengetahuan lokal.
2. Menghargai budaya lokal, bahwa tradisi dan proses budaya lokal diakui dan didukung sebagai bagian dari pengembangan masyarakat.
3. Menghargai sumberdaya lokal.
4. Menghargai keterampilan masyarakat lokal.
5. Menghargai proses lokal.
6. Partisipasi, mengakui secara adil semua yang berpartisipasi, analisis penghalang dan pendukung partisipasi agar dapat ditingkatkan partisipasi masyarakat.

Prinsip Proses, prinsip ini menekankan pentingnya proses dalam pengembangan masyarakat, bukan hanya hasil akhir:

1. **Proses, hasil dan visi; proses dan hasil** sama pentingnya.
2. **Keutuhan proses (integrity of process)**: Proses harus transparan, inklusif, dan adil serta sesuai dengan harapan, visi atau hasil-hasil terkait isu keberlanjutan, keadilan sosial dan HAM.
3. Menumbuhkan kesadaran, bisa formal dan informal membantu orang-orang secara bersama-sama menemukan pengalaman hidup dan menghubungkannya dengan struktur atau wacana kekuasaan dan penindasan
4. **Kerjasama dan konsensus, yakni** mengutamakan kerja sama dan pengambilan keputusan bersama.
5. Langkah pembangunan, konsekuensi perkembangan organisasi adalah masyarakat harus melakukan perkembangan yang bersifat jangka panjang dan tidak dapat dipercepat
6. **Perdamaian dan anti kekerasan (peace and nonviolence), yakni** menghindari kekerasan dalam proses pengembangan, baik fisik maupun struktural.
7. Inklusivitas, bahwa proses pengembangan masyarakat harus merangkul/menghargai semua orang. Prinsip inklusivitas menekankan pentingnya keterlibatan dan akses yang setara bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal, tanpa diskriminasi. Prinsip Inklusifitas dalam Pengembangan Masyarakat (Sholichah, 2025; UGM, 2020, Siti, 2025):
 - a. Partisipasi Aktif Seluruh Kelompok Masyarakat. Prinsip ini mengharuskan semua segmen masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Dengan partisipasi aktif, kebutuhan dan aspirasi semua pihak dapat terakomodasi sehingga pembangunan menjadi lebih adil dan berkelanjutan.
 - b. Non-Diskriminasi dan Pengakuan Keragaman. Inklusifitas berarti tidak ada diskriminasi dalam akses terhadap sumber daya, layanan, dan kesempatan. Pengakuan terhadap keberagaman masyarakat, baik dari segi kemampuan, latar belakang sosial, maupun kondisi ekonomi, menjadi dasar untuk memastikan setiap individu memiliki hak yang sama dalam pembangunan.
 - c. Aksesibilitas yang Setara. Pemberdayaan masyarakat inklusif harus menyediakan akses yang setara dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan publik. Hal ini termasuk memastikan bahwa fasilitas umum dan infrastruktur dapat diakses oleh semua orang tanpa hambatan, terutama bagi kelompok rentan.
 - d. Pendekatan Individual dan Kebutuhan Khusus. Selain mengarusutamakan kelompok rentan dalam program umum, perlu juga diterapkan perlakuan khusus agar mereka dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat secara setara. Pendekatan ini memastikan bahwa perbedaan kebutuhan individu dihargai dan diakomodasi dalam kebijakan pembangunan
 - e. Penguatan Kapasitas dan Kemandirian Masyarakat. Pemberdayaan inklusif tidak hanya memberikan akses, tetapi juga memperkuat kapasitas individu dan kelompok

- melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kemampuan agar mereka dapat mandiri dan berperan aktif dalam pembangunan jangka panjang.
- f. Transparansi, Akuntabilitas, dan Demokrasi. Prinsip inklusif juga menuntut proses pembangunan yang transparan dan akuntabel, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam pembangunan.
8. **Pembangunan komunitas (community building)**: memperkuat ikatan sosial dan menekankan ide saling ketergantungan.

Prinsip Global dan Lokal, bahwa pengembangan masyarakat harus mengintegrasikan kesadaran global dengan konteks lokal:

1. Menghubungkan yang global dan lokal. Kekuatan global mempengaruhi semua masyarakat
2. Praktik anti-kolonialisme. Praktik anti-kolonialisme adalah segala bentuk tindakan, gerakan, atau kebijakan yang menentang dan melawan kolonialisme, yaitu sistem penguasaan atau penjajahan oleh suatu negara atas wilayah atau bangsa lain dengan tujuan memperluas kekuasaan dan mengeksplorasi sumber daya di wilayah tersebut (Rahman, 2018). Cara melawan praktik kolonialisme adalah melalui kesadaran diri yang kritis, kesadaran, politik dan perenungan.

Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Petani Tanaman Pangan di Indonesia

Implementasi dari prinsip-prinsip pengembangan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat petani tanaman pangan di Indonesia selama periode tahun 2016 – 2025 diringkas pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Identifikasi Implementasi Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Petani Tanaman Pangan di Indonesia

No	Judul Artikel /Penulis/Tahun	Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat	Tujuan Pemberdayaan
1	<ul style="list-style-type: none"> • Empowering Farmer Group to Increase Rice Productivity for Promoting Food Security: a Case Study of the Implementation of Jarwo Super Technology in Lebak District, Banten, Indonesia • Penulis: Kusumawati S., Kurniawati S., Saryoko A., and Hidayah, I. • Tahun 2024 	Prinsip Menghargai yang lokal: menghargai sumberdaya lokal, Partisipasi Prinsip Proses: Kerjasama & konsensus, inklusivitas dan pembangunan komunitas	Pemberdayaan kelompok petani melalui bantuan terjadwal, sekolah lapangan petani (FFS) dan inspeksi lapangan, yang secara signifikan meningkatkan produktivitas padi di Indonesia dengan mempromosikan implementasi teknologi dan mendorong partisipasi petani dalam praktik pertanian. pengembangan teknologi, kemitraan, dan informasi pemasaran.
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Farmer Group Empowerment Through the Field School of Integrated Plant-Management (SLPTT) Program in Beru-Beru Village Kalukku District Mamuju Regency • Penulis: Muhammad S. Endrol Lareken, Nur Hidayat • Tahun 2024 	Prinsip keadilan & HAM: Mengatasi struktur yang merugikan, HAM, Definisi Kebutuhan Prinsip Menghargai yang Lokal: partisipasi Prinsip Proses: Kerjasama & konsesus dalam kelompok, dalam	Program SL-PTT di Indonesia memberdayakan petani tanaman pangan dengan meningkatkan hasil pertanian melalui metode partisipatif, mengatasi tantangan seperti kurangnya dukungan pemerintah, kesuburan tanah, dan penggunaan teknologi, untuk meningkatkan produksi dan

No	Judul Artikel /Penulis/Tahun	Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat	Tujuan Pemberdayaan
3	<ul style="list-style-type: none"> • Farmers Empowerment Through Rice Production Improvement Program by the Food Security and Agriculture Service of Kubu Raya District, West Kalimantan Province • Penulis: Hamid H., dan Azmi K. • Tahun 2024 	<p>kelompok, inklusivitas, pembangunan komunitas</p> <p>Prinsip Keadilan Sosial & HAM: Pemberdayaan, Definisi kebutuhan</p> <p>Prinsip Menghargai yang Lokal: Partisipasi</p> <p>Prinsip Proses: Keutuhan proses, inklusivitas</p>	<p>pendapatan kelompok petani di Sulawesi Barat</p> <p>Pemberdayaan petani di Indonesia oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya, dengan fokus memperkuat dan mendukung petani melalui pelatihan, konseling dan layanan keuangan untuk meningkatkan produksi padi</p>
4	<ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan Hasil Pertanian Jagung untuk Meningkatkan Perekonomian Desa • Penulis: Asifha Defitrian Salsabila, Solfema, Putri L.D. 	<p>Prinsip Keadilan Sosial & HAM: Pemberdayaan, Definisi kebutuhan</p>	<p>Kegiatan pemberdayaan bagi petani jagung melalui pelatihan, peningkatan akses terhadap teknologi, pemberian dukungan keuangan, dan penguatan koneksi pasar. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas panen untuk mendukung kemandirian ekonomi petani</p>
5.	<ul style="list-style-type: none"> • Empowering Farmers Through Assistance in Producing Alternative Photosynthetic Bacteria (PSB) Fertilizer for Corn Crops in Sigi District • Penulis: • Brenda Sinuuaji, Guan Xuan Wong, Putri Sely, Risqi Firdaus Setiawan, Putri Virnanda • Tahun 2022 	<p>Prinsip Ekologi: Berkelanjutan</p> <p>Prinsip Keadilan Sosial & HAM: Definisi kebutuhan</p> <p>Prinsip Proses: Pembangunan komunitas</p>	<p>Pemberdayaan petani melalui program sekolah lapangan untuk menghasilkan pupuk bakteri fotosintesis alternatif, yang dapat menyuburkan tanah, mengurangi biaya input, dan mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan untuk petani tanaman jagung di Kabupaten Sigi</p>
6.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Melalui Program Upsus Pajale di lampung Selatan • Penulis: • Khansa K., Mukmin H., Yanti F. • Tahun 2022 	<p>Prinsip Keadilan Sosial & HAM: Pemberdayaan, Definisi kebutuhan</p> <p>Prinsip Menghargai yang Lokal: Partisipasi</p> <p>Prinsip Proses: proses, hasil dan visi; kerjasama dan konsensus</p> <p>Prinsip Global dan Lokal: Menghubungkan yang global dan</p>	<p>Program Upsus PAJALE memberdayakan petani pangan di Indonesia melalui bantuan pra-tanam hingga pasca panen, pelatihan, penyediaan alat produksi, pengembangan teknologi, kemitraan, dan informasi pemasaran, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani secara keseluruhan.</p>

No	Judul Artikel /Penulis/Tahun	Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat	Tujuan Pemberdayaan
7.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Model Pemberdayaan Ekonomi Yang Menjamin Perolehan Nafkah Berkelanjutan Bagi Masyarakat Petani Lahan Kering Di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat • Penulis Ayu C., Wuryantoro , Muham mad Nursan , Aeko Fria Utama FR , Dudi Septiadi • Tahun 2022 	lokal Prinsip Ekologis: Holisme, Berkelanjutan, Keanekaragaman, Perkembangan yang seimbang Prinsip keadilan sosial & HAM: Pemberdayaan, Definisi Kebutuhan Prinsip Menghargai yang Lokal: Partisipasi Prinsip Proses: Menumbuhkan kesadaran, kerjasama dan konsensus, inklusivitas, pembangunan komunitas	Tujuan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat petani tentang pengembangan kegiatan pengolahan produk pertanian lahan kering untuk menjadi sumber pendapatan di musim kemarau, peningkatan keterampilan pengelolaan modal agar berkelanjutan di Kecamatan Sekotong.
8.	<ul style="list-style-type: none"> • Environmentally Friendly Rice Farmer Empowerment for Sustainable Food Security in Banten Province • Penulis: Mulyaningsih,, A., Suherna, Gugun Gunawan • Tahun 2021 	Prinsip Ekologis: Holisme, Berkelanjutan, Keanekaragaman, perkembangan yang seimbang Prinsip Keadilan sosial & HAM: Pemberdayaan Prinsip Menghargai yang Lokal: Partisipasi Prinsip Proses: Proses, hasil & Visi; kerjasama dan konsensus, inklusivitas, pembangunan komunitas Prinsip global dan lokal: menghubungkan yang global dan lokal	Pemberdayaan petani padi di Indonesia melalui pendidikan, dukungan masyarakat, dan informasi teknologi untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan, meningkatkan kapasitas mereka untuk pembangunan pertanian berkelanjutan dan mengatasi tantangan seperti fluktuasi pasar dan perubahan lingkungan.
9.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Perempuan Melalui Budidaya Hortikultura secara Organik Dalam Polybag di Lahan Pekarangan Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Lombok Tengah 	Prinsip Ekologi: Holisme, Berkelanjutan Prinsip Keadilan Sosial & HAM: Pemberdayaan, HAM, Definisi	Pemberdayaan kelompok perempuan melalui pengembangan sistem pertanian organik dalam wadah polybag di halaman pekarangan. Sistem binaan hemat

No	Judul Artikel /Penulis/Tahun	Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat	Tujuan Pemberdayaan
10.	<ul style="list-style-type: none"> • Penulis: Ayu C., Susilawati LE. Sudika I.W., Santoso, B.B. dan Muktasam • Tahun 2019 	<p>Kebutuhan Prinsip Menghargai yang Lokal: Partisipasi Prinsip Proses: menumbuhkan kesadaran, kerjasama dan konsensus, inklusivitas</p> <p>Prinsip Keadilan Sosial & HAM: Pemberdayaan, Definisi Kebutuhan Prinsip Menghargai yang Lokal: partisipasi Prinsip Proses: Keutuhan proses, menumbuhkan kesadaran, kerjasama & konsensus</p>	<p>lahan dan pengelolaan lebih optimal sehingga perolehan produksi dan pendapatannya.</p> <p>Kegiatan pemberdayaan bagi petani tanaman pangan di Indonesia meliputi penyuluhan pertanian rutin oleh petugas lapangan, dengan fokus pada perencanaan, implementasi, dan evaluasi, memungkinkan petani mengenali masalah, mencari solusi, dan meningkatkan kinerja pertaniannya melalui pengembangan pengetahuan dan keterampilan.</p>
11.	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Petani Peserta Usahatani Konservasi Berbasis Revitalisasi Potensi Sistem Agribisnis Lahan Kering-Marjinal di Zona Tambang Emas Pulau Lombok • Penulis: Wuryantoro, Ayu, C. dan Hidayati, H • Tahun 2017 	<p>Prinsip Ekologis: Holisme, Berkelanjutan, Keanekaragaman, Perkembangan yang seimbang</p> <p>Prinsip keadilan sosial & HAM: Pemberdayaan, Definisi Kebutuhan Prinsip Menghargai yang Lokal: Partisipasi Prinsip Proses: Menumbuhkan kesadaran, kerjasama dan konsensus, inklusivitas, pembangunan komunitas</p>	<p>Tujuan pemberdayaan adalah membangun jiwa kewirausahaan masyarakat petani lahan kering-marjinal untuk mengembangkan sistem agribisnis berbasis hasil usahatani unggulan lokal, dilakukan melalui perbaikan produktivitas lahan, pengolahan pangan berbasis komoditi unggulan lokal yang dapat memberi nilai tambah dan berdaya saing, dan meningkatkan kemampuan dalam pemasaran produk</p>
12.	<ul style="list-style-type: none"> • Farmer Community Empowerment Through Institutional Strenghtning of Rural Food Barn • Peneliti: Babua M.I., Arsyad, M dan Jamil M.H. 	<p>Prinsip Keadilan Sosial & HAM: Pemberdayaan, HAM Prinsip Menghargai yang</p>	<p>Pemberdayaan masyarakat petani di Gorontalo, Indonesia, melalui penguatan lumbung pangan pedesaan, yang meningkatkan ketahanan</p>

No	Judul Artikel /Penulis/Tahun	Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat	Tujuan Pemberdayaan
• Tahun: 2016		Lokal: Partisipasi Prinsip Proses: Menumbuhkan kesadaran, kerjasama dan konsensus, inklusivitas	pangan dan kesejahteraan keluarga

Berdasarkan data pada tabel 1 maka dapat diidentifikasi jenis-jenis prinsip-prinsip pengembangan masyarakat yang banyak diadopsi untuk program pemberdayaan masyarakat petani selama periode tahun 2015 – 2025. Program pemberdayaan ini dilakukan oleh pihak pemerintah, lembaga pendidikan dan penelitian, maupun oleh pihak swasta. Rincian selengkapnya tentang tendensi adopsi prinsip-prinsip pengembangan masyarakat dalam pemberdayaan petani tanaman pangan di Indonesia pada tabel 2.

Berdasarkan data pada tabel 2 diketahui bahwa sebanyak 65 % dari 26 prinsip-prinsip pengembangan masyarakat yang telah diimplementasikan dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat petani tanaman pangan di Indonesia dengan tingkat penerapan dari 8,33 % sampai 83,33 %. Namun, terdapat 35 % prinsip yang belum diterapkan dan terbanyak dari kelompok prinsip menghargai yang lokal. Adapun prinsip-prinsip yang belum diterapkan dalam program pemberdayaan masyarakat petani tanaman pangan meliputi prinsip keanekaragaman, mengatasi wacana yang merugikan, menghargai pengetahuan lokal, menghargai budaya lokal, menghargai keterampilan masyarakat lokal, menghargai proses lokal, langkah pembangunan, perdamaian dan anti kekerasan, serta prinsip praktik anti-kolonialisme.

Tabel 2. Penentuan tendensi implementasi prinsip-prinsip pengembangan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat petani

No	Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat dalam Pemberdayaan	Nomor Artikel pada Tabel 1												Jumlah	Persentase (%)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
A. Prinsip Ekologi:															
1	Holisme	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	4	33,33
2	Berkelanjutan	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	5	41,67
3	Keanekaragamn	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3	25,00
4	Keanekaragaman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5	Perkembangan yang seimbang	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3	25,00
B. Prinsip Keadilan Sosial & HAM:															
1	Mengatasi struktur yang merugikan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8,33
2	Mengatasi Wacana yang merugikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3	Pemberdayaan	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	9	75,00
4	HAM	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	16,67
5	Definisi Kebutuhan	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	10	83,33
C. Prinsip Menghargai yang Lokal:															
1	Menghargai pengetahuan lokal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

No	Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat dalam Pemberdayaan	Nomor Artikel pada Tabel 1												Jumlah	Percentase (%)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2	Menghargai budaya lokal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3	Menghargai sumberdaya lokal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8,33
4	Menghargai keterampilan masyarakat lokal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5	Menghargai proses lokal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	Partisipasi	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	10	83,33
D. Prinsip Proses:															
1	Proses, Hasil dan Visi	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	16,67
2	Keutuhan Proses	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	16,67
3	Menumbuhkan Kesadaran	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	5	41,67
4	Kerjasama dan konsensus	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	9	75,00
5	Langkah pembangunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	Perdamaian dan anti kekerasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7	Inklusivitas	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	8	66,67
8	Pembangunan komunitas	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	5	41,67
E. Prinsip Global dan Lokal:															
1	Menghubungkan yang Lokal dan Global	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	16,67
2	Praktik anti- kolonialisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Keterangan: Arti 0 = tidak diimplementasikan; 1 = diimplementasikan

Secara keseluruhan untuk 65 % prinsip pengembangan masyarakat dalam program pemberdayaan tergolong cukup baik, terutama pada aspek partisipasi, pemberdayaan, dan definisi kebutuhan. Namun demikian, terdapat kelemahan pada penghargaan terhadap sumber daya lokal, perlindungan hak asasi manusia, serta integrasi perspektif global. Oleh karena itu, program pemberdayaan perlu terus meningkatkan penerapan prinsip-prinsip yang masih kurang untuk mewujudkan pembangunan masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Implementasi prinsip-prinsip pengembangan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat petani tanaman pangan di Indonesia selama periode tahun 2015-2025 lebih didominasi dengan prinsip pemberdayaan, partisipasi dan inklusivitas.

Prinsip Ekologi yang sudah diterapkan mencakup aspek holisme, keberlanjutan, keanekaragaman, dan perkembangan yang seimbang. Berdasarkan tabel 2, prinsip keberlanjutan paling sering diterapkan dengan persentase 41,67%, diikuti oleh holisme sebesar 33,33%, keanekaragaman 25%, dan perkembangan seimbang juga 25%. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap lingkungan dan keberlanjutan mulai meningkat dalam program pemberdayaan, meskipun belum menjadi fokus utama di semua program. Penerapan prinsip ini penting untuk memastikan bahwa proses pemberdayaan masyarakat tidak merusak lingkungan dan dapat berlangsung secara berkelanjutan (Sumaryanto, 2020).

Prinsip Keadilan Sosial dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sudah diterapkan meliputi upaya mengatasi struktur sosial yang merugikan, pemberdayaan, HAM, serta definisi

kebutuhan masyarakat. Dari hasil analisis, pemberdayaan dan definisi kebutuhan menjadi prinsip yang paling dominan dengan persentase masing-masing 75% dan 83,33%. Sementara itu, aspek HAM dan upaya mengatasi struktur yang merugikan masih tergolong rendah, yaitu 16,67% dan 8,33%. Hal ini mengindikasikan bahwa program lebih banyak berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan pemberdayaan langsung masyarakat, namun perlindungan HAM dan perubahan struktur sosial yang merugikan perlu mendapat perhatian lebih (Edi, 2016).

Pemberdayaan masyarakat menjadi inti pembangunan kualitas sumberdaya manusia karena memberi kesempatan berpartisipasi yang setara dalam pembangunan sosial dan ekonomi, didukung oleh penegakan kebijakan (hukum dan HAM). Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mendukung kelompok rentan, terutama perempuan dan menjadi tantangan dalam pengembangan masyarakat. Pemberdayaan perempuan seharusnya diprioritaskan agar hak mereka diakui dan dilindungi, dengan penguatan peraturan perundang-undangan terkait. Sinergi pemberdayaan, perlindungan HAM, dan perubahan struktur sosial yang adil menjadi cara yang strategis untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan berkeadilan sosial di Indonesia (Situmorang et al., 2024; Wardhana, 2023).

Prinsip Menghargai yang Lokal menekankan pentingnya penghargaan terhadap sumber daya lokal serta partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi masyarakat tercatat sangat dominan dengan persentase 83,33%, sementara penghargaan terhadap sumber daya lokal masih rendah, yaitu 8,33%. Artinya, keterlibatan masyarakat dalam proses pemberdayaan sudah berjalan sangat baik, namun optimalisasi potensi lokal masih perlu ditingkatkan. Prinsip ini mencakup penghargaan terhadap pengetahuan, keterampilan, budaya, dan sumber daya lokal sebagai modal utama pembangunan berbasis masyarakat. Penghargaan kearifan lokal tidak hanya menjaga kelestarian budaya dan lingkungan, tetapi juga memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan sosial. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, kunci keberhasilan pemberdayaan, namun rendahnya penghargaan potensi lokal menuntut peningkatan kesadaran dan pemanfaatan sumber daya lokal untuk keberlanjutan dan kesejahteraan (Suharto, 2014; Kementerian Kesehatan RI, 2013; Puskomedia, 2025).

Prinsip proses mencakup visi, keutuhan proses, kesadaran, konsensus, inklusivitas, dan pembangunan komunitas. Konsensus dan inklusivitas menunjukkan angka yang cukup tinggi, masing-masing 75% dan 66,67%. Konsensus dan inklusivitas menandakan keterlibatan semua pihak secara kolektif dan demokratis. Konsensus ini penting untuk komunikasi terbuka antar pemangku kepentingan, meningkatkan efektivitas kebijakan publik (Nasution & Fitryantica, 2023). Inklusivitas memastikan partisipasi kelompok-kelompok tertentu (kelompok perempuan, kelompok marginal, dan pemuda) untuk mendukung pengambilan keputusan yang representatif dan keberlanjutan komunitas (Rizal & Kharis, 2022). Meski konsensus dan inklusivitas sudah baik, keutuhan proses dan pembangunan komunitas masih perlu perhatian agar dampak jangka panjang terjaga. Karena aspek keutuhan proses tergolong rendah, yakni pada kisaran 16,67% - 41,67%. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan sudah mulai bersifat inklusif dan kolaboratif, tetapi kesinambungan dan dampak jangka panjang masih membutuhkan perhatian lebih intensif. Penguatan pendidikan non formal menjadi strategi penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, serta memperkuat jaringan sosial dalam proses pengembangan masyarakat.

Prinsip Global dan Lokal menghubungkan aspek lokal dengan perspektif global, namun penerapannya masih rendah, yaitu 16,67%. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi pandangan global dalam pemberdayaan masyarakat lokal masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Prinsip global dan lokal menjadi fokus penting dalam pembaruan dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Faktor sosial dan budaya lokal sangat memengaruhi keberhasilan kebijakan berbasis kearifan lokal sehingga partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengelolaan sumber daya lokal. Namun, menurut Liem (2022), banyak masyarakat lokal menghadapi kesulitan mengintegrasikan perspektif global dalam praktik sehari-hari dan ini menjadi kendala untuk tercapainya pemberdayaan berkelanjutan. Dari aspek ekonomi, Alafgani et al. (2024) menyoroti model Community Supported Agriculture (CSA) yang menggabungkan pendekatan berkelanjutan dan berbasis

komunitas. CSA mendukung petani lokal sekaligus mengadaptasi perspektif global untuk pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Meskipun tantangan integrasi prinsip global dalam konteks lokal masih besar, pendekatan kolaboratif berbasis kearifan lokal dapat menjadi solusi efektif untuk memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan potensi mereka dalam kerangka global.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diiketahui bahwa program pemberdayaan untuk masyarakat petani tanaman pangan di Indonesia belum sepenuhnya mempertimbangkan potensi lokal, masih kurang berpihak kepada masyarakat karena masih semi top down. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 65% prinsip pengembangan masyarakat telah diimplementasikan dengan baik, terutama pada aspek partisipasi, pemberdayaan, dan definisi kebutuhan yang mencapai 83%. Hal ini menandakan mayoritas program pemberdayaan melibatkan masyarakat secara aktif dan berbasis kebutuhan nyata. Namun, terdapat kelemahan signifikan pada prinsip penghargaan terhadap sumber daya lokal dan penghapusan struktur yang merugikan petani, dengan implementasi hanya 8%. Kondisi ini menunjukkan potensi lokal belum dimanfaatkan optimal dan struktur sosial-ekonomi yang merugikan petani masih banyak diperbaiki. Kesenjangan ini menghambat terciptanya pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan penghargaan terhadap sumber daya lokal melalui pengoptimalan pengetahuan tradisional dan potensi alam, serta reformasi struktur sosial-ekonomi yang selama ini merugikan petani. Diperlukan strategi khusus dalam aktivitas pemberdayaan agar pembangunan masyarakat benar-benar inklusif, adil, dan berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian yang sangat bergantung pada sumber daya lokal dan struktur sosial yang adil. Perbaikan dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan komunitas, reformasi kebijakan berpihak kepada petani, serta penguatan kelembagaan dan jejaring antar petani dan kelompok taninya.

REKOMENDASI

Integrasi prinsip menghargai yang lokal, terutama pada aspek yang belum banyak diimplementasikan seperti penghargaan terhadap pengetahuan lokal, budaya lokal, keterampilan masyarakat, dan proses pembangunan lokal. Penelitian ini penting untuk merumuskan strategi pemberdayaan berbasis kearifan lokal yang dapat memperkuat identitas komunitas dan mendukung keberlanjutan sosial-budaya. Selain itu, dibutuhkan eksplorasi lebih lanjut terkait rendahnya penerapan prinsip global dan lokal, termasuk hambatan struktural dan sosio-kultural dalam mengadopsi perspektif global di tingkat komunitas. Penelitian juga sebaiknya mengkaji efektivitas prinsip anti-kolonialisme dalam konteks pemberdayaan petani sebagai respon terhadap ketimpangan struktural dan dominasi eksternal dalam pengelolaan sumber daya. Di samping itu, analisis longitudinal terhadap dampak jangka panjang penerapan prinsip-proses seperti keutuhan proses, langkah pembangunan, dan pembangunan komunitas dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keberlanjutan hasil pemberdayaan. Penelitian partisipatif dengan pendekatan transdisipliner juga sangat dianjurkan guna memperkuat sinergi antara akademisi, petani, pemerintah, dan lembaga non-pemerintah dalam merancang model pemberdayaan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alafgani, F., Setiawan, I., & Kadapi, M. (2024). Analisis Permasalahan Seni Tani dalam Menerapkan Konsep Community Supported Agriculture (csa). *Mimbar Agribisnis Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 10(1), 278. <https://doi.org/10.25157/ma.v10i1.11659>
- Ayu, C. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Perempuan Melalui Budidaya Hortikultura secara Organik Dalam Polybag di Lahan Pekarangan Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Lombok Tengah. *Jurnal Ilmiah Abdi Mas TPB Volume1*, Nomor 1, Januari 2019<https://abdimastpb.unram.ac.id/index.php/AMTPB/article/view/>
- Ayu , C, Wuryantoro , Nursan, M , Aeko F,R dan Septiadi, D. (2022). Pengembangan Model Pemberdayaan Ekonomi Yang Menjamin Perolehan Nafkah Berkelanjutan Bagi Masyarakat Petani Lahan Kering Di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.

- Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA.* Vol 5 No 1: Januari - Maret . 374-379 h.
<https://jppipa.unram.ac.id/index.php/jpmi/article/view/1845>
- Bahua, M.I., Arsyad, M dan Jamil, M.H. (2016). Farmers Community Empowerment Through Institutional Strengthning of Rural food Barn. *International Journal of Agriculture System (IJAS).* Vol. 4 Issue 2, December 2016.
<http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/ijas/issue/view/19>
- Deyanty E.S., Zulkarnain dan Nurhadi. (2018). Empowering Farmers in Improving Farmer Business Performance: Study at the Imuugi Rarayur Farmer Group in Ponorogo Regency Indonesia. *Proceedings of the 3rd International Conference on Educational Management and Administration (CoEMA 2018) Atlantis Press.* Pp 215-218.
- Digdowiseiso, K. (2019). Teori Pembangunan. Penerbit: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS). 99h.
- Edi, M. (2016). Pemberdayaan Masyarakat: Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana.
- Famuji, U. (2022). Strategi pemberdayaan petani kentang untuk meningkatkan kesejahteraan petani. *Jurnal Agribisnis*, 5(1), 1-15.
- Hamid, H dan Azmi, K. (2024). Farmer Empowerment Through Rice Production Improvement Program by The Food Security and Agriculture Service of Kubu Raya District, West Kalimantan Province. *Journal of Asian Multicultural Researces*.
- Hasim dan Resmiwal. (2009). Community Development Berbasis Ekosistem: Sebuah Alternatif Pengembangan Masyarakat Penerbit DIADIT MEDIA. Jakarta. 252 h.
- Ife, J., dan Tesoriero, F. (2024). Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi. Pustaka Pelajar. Jakarta. 721 h.
- Iryana, A. B. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Petani Dalam Meningkatkan Kesehateraan Hidup di Kecamatan Compreng-Kabupaten Subang. Vol 1 No 02 (2018): *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik.*
<http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja/article/view/69>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat (PMK No. 65 Tahun 2013). Jakarta: Kemenkes RI.
- Khansa K., Mukmin H. dan Yanti F. (2022). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Melalui Program Uupsus Pajale di Lampung Selatan. *Ijtima'yya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam.* Vol.15 Nomor 1 (2022). Doi:
<https://doi.org/10.24042/ijpmi.v15i1.119118>
- Kusumawati S, Kurniawati, S., Saryoko, A and Hidayah I. (2022). Empowering Farmer Group to Increase Rice Productivity for Promoting Food Security: a Case Study of the Implementation of Jarwo super Technology in Lebak District, Banten, Indonesia. Published Under Licence by IOP Publishing Ltd. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 978, The 3rd International Conference on Agriculture and Rural Development 30/11/2021 - 30/11/2021 Serang. doi:
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/978/1/012007>
- Liem, T. (2022). Problematika Hukum Proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Tetap oleh Kreditor. *MLJ*, 6(1), 95-104.
<https://doi.org/10.56338/mlj.v6i1.2202>
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2019). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik (Cetakan ke-5). Alfabeta.
- Midgley, J. 2025. *Pembangunan sosial: Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan sosial*. Jakarta: Ditperta Islam.
- Muhammad S., Lareken, E., dan Hidayat, N. (2024). Farmer Group Empowerment Through The Field School of Integrated Plant-Management (SL_PTT) Program in Beeru-Beru Village Kalukku District Mamuju Regency. *Jurnal MSDA* (Institut Pemerintahan Dalam Negeri), Vol 12, issue 2. Pp 179-197.
- Mulyaningsih A., Suherna S., dan Gunawan, G. (2021). Environmentally Friendly Rice Farmer Empowerment for Sustainable Food Security in Banten Province. *Jurnal Penyuluhan*. Vol. 17, issue 1. Pp 103-112.
<https://journal.ipb.ac.id/index.php/jupe/article/view/32969>

- Munaji, A. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Komunitas. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya. <https://repository.uinsaizu.ac.id/7050/>
- Nasution, S. dan Fitryantica, A. (2023). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Bidang Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan melalui Aplikasi e-open di Kota Bekasi. Focus, 4(2), 198-204. <https://doi.org/10.37010/fcs.v4i2.1361>
- Papayan, D. (2023). Mengukur dampak pemberdayaan petani sorgum dan implementasi Sihade di Desa Papayan. Desa Papayan. <https://www.papayan.desa.id/mengukur-dampak-pemberdayaan-petani-sorgum-dan-implementasi-sihade-di-desa-papayan/>
- Portes, A., dan Tikson, J. (1993). *Social Capital and Development*. Journal of Economic Perspectives, 7(3), 123-140.
- Puskomedia. (2025). Menuju Desa Wisata yang Berkelinjutan: Membangun Komunitas dan Menghargai Kearifan Lokal. Panda Sistem Informasi Desa.
- Rahman, Y. (2018). Gerakan Anti-Kolonialisme Menuju Indonesia Merdeka dalam Perspektif Smelserian. SIMULACRA, Volume 1, Nomor 2, November 2018. 184 -202 h.
- Rizal, D. and Kharis, A. (2022). Kesadaran Sosial dalam Pemikiran Nietzsche: Tinjauan dalam Proses Pengembangan Masyarakat di Indonesia. Empower Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 7(1), 69. <https://doi.org/10.24235/empower.v7i1.9787>
- Rustandi, Y., dan Ismulhadi. (2019). Peran kelompok tani dalam usaha meningkatkan pendapatan anggota melalui program kemitraan usahatani. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 3(2), 449-455
- Salsabila A.D., Solfema dan Putri L.D. (2024). Pengolahan Hasil Pertanian Jagung untuk Meningkatkan Perekonomian Desa. Harmoni Pendidikan, Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen (LPKD). Vol 2, issue 11; pp 192 – 200.
- Sholichah H, Al Fajar A.H. Syamraeni, Mudfa'inna. (2025). Systematic Literature Review : Pemberdayaan Masyarakat Inklusif Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial. JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora) Volume 11 Nomor 1Maret 2025(PP. 27-40)
- Sinuhaji, Wwang G.X, Serly P., Setiawan R.F., Virnanda P. (2024). Empowering Farmers Through Assistance in Producing Alternative Photosynthetic Bacteria (PSB_Fertilizers for Corn Crops in Sigi District. AJARCDE (Asian Journal of Applied Research for Community Development and Empowerment). Vol. 8. No. 2. Doi: <https://doi.org/10.29165/ajarcde.v8i2.423>
- Siti, M. (2025). Strategi Pemberdayaan Masyarakat: Pengertian, Konsep, Tujuan, dan Contohnya. Gramedia Blok. <https://www.gramedia.com/literasi/strategi-pemberdayaan-masyarakat/>
- Situmorang, C., Athallah, R., Butar, F., & Triadi, I. (2024). Pentingnya hukum yang tegas dalam mempertahankan hak asasi manusia: perspektif konstitusi. jcl, 1(2), 13. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2427>
- Suaib. (2023). Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit CV Adanu Abimata. Jakarta. 262 h.
- Suharto, E. (2014). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Penerbit: Refika Aditama. Bandung
- Sumaryanto, S. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan. Yogyakarta: Deepublish.
- UGM. (2020). Pembangunan Inklusif bagi Masyarakat Indonesia yang Beragam. <https://ugm.ac.id/id/berita/19005-pembangunan-inklusif>
- Unila. (2023). Pemberdayaan petani dalam penanggulangan dampak El Nino terhadap kenaikan harga beras dan ketahanan pangan. Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
- Wahyuni, W. (2021). Strategi pemberdayaan masyarakat petani melalui pengembangan agribisnis (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Wardhana, D. (2023). Tinjauan yuridis putusan mahkamah konstitusi dalam putusan nomor 18/puu-v/2007 tentang pengujian undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. SLR, 5(1). <https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.1.3495>

- Wuryantoro, Ayu, C dan Hidayati, A, (2017). Implementasi Model Pengentasan Kemiskinan Petani Peserta Usahatani Konservasi Berbasis Revitalisasi Potensi Sistem Agribisnis Lahan Kering-Marjinal Zona Emas Pulau Lombok. Jurnal Abdi Insani Universitas Mataram / Vol. 4 No. 2 (2017).
<https://abdiinsani.unram.ac.id/index.php/jurnal/article/view/>
- Zubaedi. (2016). Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik. Penerbit PRENADAMEDIA GROUP. Jakarta. 269 h.